



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA TERNATE

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate tahun 2025.

Harapan kami, manual IKU ini dapat menjadi acuan serta dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi capaian kinerja dapat lebih mudah dilaksanakan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah telah Memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Manual IKU PPN Ternate.

Ternate, Januari 2025
Kepala PPN Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kamarudin



Kamarudin, S.Pi, M.Si

Kepala PPNTernate



Daftar Isi

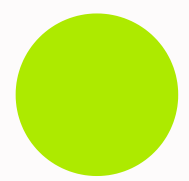
- 01. IKU 1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)
- 02. IKU 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)
- 03. IKU 3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)
- 04. IKU 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)
- 05. IKU 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)
- 06. IKU 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)
- 07. IKU 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)
- 08. IKU 8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)



Daftar Isi

09. IKU 9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
10. IKU 10 Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
11. IKU 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja PPN Ternate
12. IKU 12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)
13. IKU 13 Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)
14. IKU 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
15. IKU 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)
16. IKU 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)
17. IKU 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPNT (Nilai)
- 18 IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)





IK 01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)

Formula Perhitungan

Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan .

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV



Penanggung jawab

Tim Kerja

Tata Kelola & Pelayanan Usaha



Validitas

Output Kendali rendah



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



Satuan

Rp. Juta

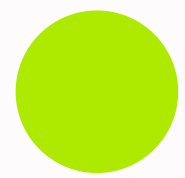
TARGET 2025



2.294,76

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
573,69	1.147,38	1.721,07	2.294,76



IK 02

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat

Nama Indikator

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

- Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah
- Jumlah Produksi Pendaratan Ikan dari Kapal Penangkap, Kapal Penangkut serta Ikan Kiriman yang diaratkan di PPN Ternate

Formula Perhitungan

$$[\text{Prod}] \text{ (Perikanan Tangkap)} = [\text{Prod}] \text{ _PTL} + [\text{Prod}] \text{ _PTPD}$$

Keterangan:

ProdPTL = Produksi Perikanan Tangkap Laut

ProdPTPD = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.000	2.000	3.000	4.000



Penanggung jawab
Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Validitas

Outcome



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



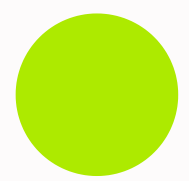
Satuan

Ton

TARGET 2025



4.000



IK 03

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Nama Indikator

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

- Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.
- Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.

Formula Perhitungan

Indikator I : (Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi)/"Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker) " x 80%

Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %

Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	100



Penanggung jawab

Tim Kerja

Tata Kelola & Pelayanan Usaha



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



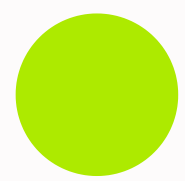
Satuan

Persen

TARGET 2025



100



IK 04 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Nama Indikator

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri

Formula Perhitungan

$NK = (Bobot(A) \times Skala(S)) / 4$

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Keterangan :

1.Sangat baik jika $NK = (86 - 100)$

2.Baik jika $NK = (66 - 85)$

3.Sedang jika $NK : (46 - 65)$

4.Kurang jika $NK = (0 - 45)$

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
87	87	87	87



Penanggung jawab
Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



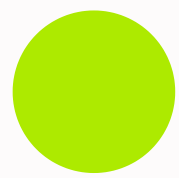
Satuan

Nilai

TARGET 2025



87



IK 05

Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Nama Indikator

Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Merupakan indikator yang menunjukkan:

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)

Formula Perhitungan

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)
 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)
 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)
- Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3

Sumber Data

Tim Ker ja Kesyahbandaran



Penanggung jawab
Tim Ker ja
Kesyahbandaran



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



Satuan

Persen

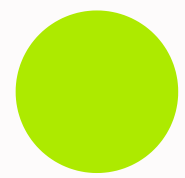
TARGET 2025



55

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	55



IK 06

Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Nama Indikator

Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Pengembangan Fasilitas Eksisting (ha)}}{\text{Luas Pelabuhan Sesuai Master Plan (ha)}} \times 100\%$$

Sumber Data

Tim Ker ja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Data Pemanfaatan Lahan

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	80



Penanggung jawab

Tim Ker ja

Tata Kelola & Pelayanan Usaha



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



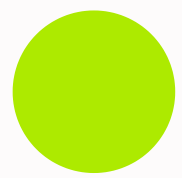
Satuan

Persen

TARGET 2025



80



IK 07

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Nama Indikator

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

•Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

•SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Formula Perhitungan

Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)
Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring
Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I: Nilai TW II = capaian TW II: Nilai TW III = capaian TW III: Nilai TW IV = capaian TW IV

Kategori

Kurang : 0-30
Cukup : >30-60

Baik : >61 - 80
Sangat Baik : >81 - 100

Sumber Data

Tim Ker ja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (aplikasi Selaraskan)

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
30,10	30,10	30,10	30,10



Penanggung jawab

Tim Ker ja

Tata Kelola & Pelayanan Usaha



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



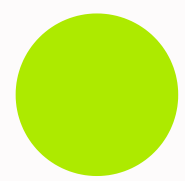
Satuan

Nilai

TARGET 2025



30,10



IK 08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Sasaran

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Defenisi

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Formula Perhitungan

Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Keterangan:

Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I;

Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II;

Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III;

Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV

Sumber Data

Tim Ker ja Kesyahbandaran
Aplikasi Sicefi

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
293	318	343	368



Penanggung jawab

Tim Ker ja
Kesyahbandaran



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode
Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



Satuan

Kapal

TARGET 2025



368

●

IK 09

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Beker ja Awak Kapal Perikanan

Sasaran

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Beker ja Awak Kapal Perikanan

Defenisi

- Merupakan indikator yang menunjukan pemenuhan persyaratan beker ja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
- Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
- Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;

Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;

Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;

Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Formula Perhitungan

Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan beker ja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}} \right)$	Keterangan: (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SK) (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib lengkap 0,75 untuk kapal >100 Laut Sepati) (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT) (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a) (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b) (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c) (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}} \right)$	
(3) Kepatuhan > 30 s.d. 100 GT	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB > 30 s.d. 100 GT}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB > 30 s.d. 100 GT}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB > 30 s.d. 100 GT}} \right)$	
(4) Kepatuhan > 100 GT	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB > 100 GT}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB > 100 GT}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB > 100 GT}} \right)$	
(5) Kepatuhan > 100 GT Laut Lepas	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB > 100 GT Laut Lepas}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB > 100 GT Laut Lepas}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB > 100 GT Laut Lepas}} \right)$	
(6) Kepatuhan > 300 GT	$= \left(\frac{e \times 0,25}{\text{Jumlah SPB > 300 GT}} \right) + \left(\frac{f \times 0,50}{\text{Jumlah SPB > 300 GT}} \right) + \left(\frac{h \times 1,00}{\text{Jumlah SPB > 300 GT}} \right)$	
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$	

Sumber Data

Tim Ker ja Kesyahbandaran

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	0,26	-	0,26



Penanggung jawab
Tim Ker ja
Kesyahbandaran



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode
Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



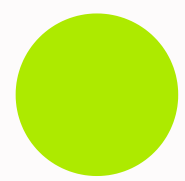
Satuan

Nilai

TARGET 2025



0,26



IK 10

Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama

Indikator

Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik

Formula Perhitungan

Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja

Sumber Data Tim Kerja Dukungan Manajemen



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



Satuan

Nilai

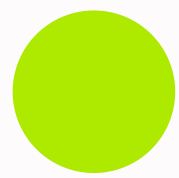
TARGET 2025



75,50

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	75,50



IK 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan

$$RHP = \left[\frac{\sum N_t}{\sum N} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

Sumber Data Tim Kerja Dukungan Manajemen



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



Satuan

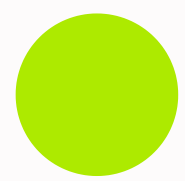
Persen

TARGET 2025



85

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
85	85	85	85



IK 12

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan

Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di PPN Ternate

ategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber Data Tim Kerja Dukungan Manajemen

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	88



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



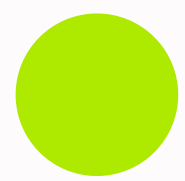
Satuan

Nilai

TARGET 2025



88



IK 13

Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Formula Perhitungan

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajemen

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	82	-	87



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Semester



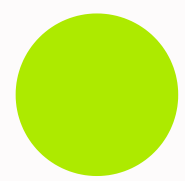
Satuan

Indwks

TARGET 2025



87



IK 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/ jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/ jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Perhitungan

$$\frac{(\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP})}{\text{"Pagu Pengadaan Barang/Jasa "}} \times 100\%$$

Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajemen



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



Satuan

Persen

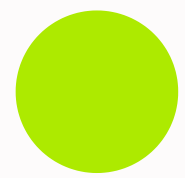
TARGET 2025



76

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
76	76	76	76



IK 15

Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Dit.jen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Perhitungan

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Sumber Data

Tim Ker ja Dukungan Manajemen

Rincian Target

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	81



Penanggung jawab
Tim Ker ja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



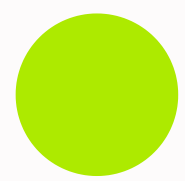
Satuan

Persen

TARGET 2025



81



IK 16

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Formula Perhitungan

Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajemen



Penanggung jawab
Tim Kerja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Semester



Satuan

Nilai

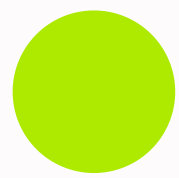
TARGET 2025



92

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	92	-	92



IK 17

Nilai Kiner ja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Nilai Kiner ja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Nilai Kiner ja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kiner ja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kiner ja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kiner ja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kiner ja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan

NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Eektivitas 75% (Capaian R0, Penggunaan SBK 75%), dan Efisiensi 25% (Penggunaan SBK 10%, Efisiensi SBK 15%) sesuai dengan bobot masing-masing indikator.

Sumber Data Tim Ker ja Dukungan Manajemen

Rincian Target			
Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
-	-	-	71,5



Penanggung jawab
Tim Ker ja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Rendah



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Tahunan



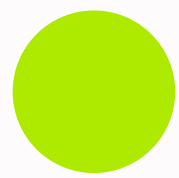
Satuan

Nilai

TARGET 2025



71,5



IK 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Nama Indikator

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Defenisi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Formula Perhitungan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

Sumber Data Tim Ker ja Dukungan Manajemen



Penanggung jawab
Tim Ker ja
Dukungan Manajemen



Validitas

Output Kendali Tinggi



Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Metode Cascading

Buat Baru



Periode

Triwulan



Satuan

Nilai

TARGET 2025



88,5

Rincian Target

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
88,5	88,5	88,5	88,5



TERIMA KASIH

Follow Sosial Media



PPN Ternate

